

**PENGOLAHAN SAMPAH BERBASIS *REFUSE DERIVED FUEL* (RDF)
SEBAGAI STRATEGI PENGENDALIAN VOLUME SAMPAH
PERKOTAAN DI DKI JAKARTA DITINJAU DARI ASAS TATA
KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK**

Rachel Durrotunnashah¹ dan Rr. Dinarjati Eka Puspitasari²

INTISARI

Penelitian dalam penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pengolahan sampah berbasis teknologi *Refuse Derived Fuel* (RDF) yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mengendalikan volume sampah perkotaan di wilayahnya dengan salah satu asas dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yakni Asas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang kemudian didukung oleh data yang diperoleh dari penelitian langsung (empiris). Penelitian dilakukan dengan cara meneliti sumber bahan pustaka dan wawancara secara langsung untuk memperoleh data yang akurat dan relevan dengan topik penelitian. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif, dan kemudian disajikan secara deskriptif.

Hasil yang didapatkan dari penelitian ini diketahui bahwa pengolahan sampah berbasis teknologi RDF yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada di dalam Asas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, selain itu pemanfaatan teknologi RDF sebagai salah satu kegiatan strategis penanggulangan sampah juga dinilai belum efektif dalam mengendalikan volume sampah dan mengatasi permasalahan sampah yang ada.

Kata Kunci: Kebijakan Pengelolaan Sampah, *Refused Derived Fuel* (RDF), Asas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

¹ Mahasiswa Departemen Hukum Lingkungan, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

² Dosen Departemen Hukum Lingkungan, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

WASTE PROCESSING BASED ON REFUSED DERIVED FUEL AS A STRATEGY TO CONTROL THE VOLUME OF URBAN WASTE IN DKI JAKARTA IN TERMS OF THE PRINCIPLE OF GOOD GOVERNANCE

Rachel Durrotunnashah¹ and Rr. Dinarjati Eka Puspitasari²

ABSTRACT

This Legal Writing Research aims to determine the suitability of the planning and implementation of waste management based on Refuse Derived Fuel (RDF) technology policy by the Government of DKI Jakarta in controlling the volume of urban waste with one of environmental and management's principles, namely the Principle of Good Governance.

This research uses normative legal research methods then supported by data obtained from direct (empirical) research. This research was conducted by examining library material sources and direct interviews to obtain accurate and relevant data. Obtained data is analyzed by qualitative methods then presented descriptively.

The conclusions drawn by this research known that the implementation of the waste processing based on RDF technology carried out by the Government of DKI Jakarta has not been accordance with the Principle of Good Governance, besides the use of RDF technology as one of the waste management strategic is also considered ineffective in controlling the volume of waste and solving the existing waste problems.

Keywords: *Waste Management Policy, Refuse Derived Fuel (RDF), the Principle of Good Governance*

¹ Student of Environmental Law Department, Faculty of Law Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

² Lecturer at Environmental Law Department, Faculty of Law Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta